

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada tanggal 5 Juli 2006 masyarakat internasional dikejutkan dengan aksi peluncuran peluru kendali Korea Utara, yang sekaligus merupakan puncak dari krisis nuklir yang telah berlangsung sebelumnya. Krisis serupa juga terjadi di akhir tahun 2002, yang cukup banyak menyita perhatian dunia internasional. Krisis ini semakin menjadi rumit ketika antar kedua belah pihak (Amerika Serikat dan Korea Utara) mulai menunjukkan arogansinya dan menciptakan perang pernyataan yang membuat situasi semakin memanas. Korea Utara mengambil langkah – langkah yang tergolong berani dan ”melawan arus”, seperti pada bulan oktober 2002 mengambil langkah pengusiran inspektur PBB dan menarik diri dari *Nuclear non – Proliferation Treaty ( NPT)*.<sup>1</sup> Pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2003 dalam forum dialog enam negara (Korea Selatan, Korea Utara, Cina, Jepang, dan Rusia) wakil menteri luar negeri Korea Utara memberikan pernyataan yang nadanya cukup membuat suasana persidangan yang tadinya penuh dengan suasana keakraban berubah menjadi ketegangan, isinya menegaskan bahwa Korea Utara akan mengembangkan program senjata nuklir, kemungkinan lebih tinggi lagi yakni mengembangkan program peluru kendali berteknologi tinggi.

Dari konflik yang terjadi antara Amerika Serikat dan Korea Utara di akhir tahun 2002, ada imbas dari krisis ini, yaitu adanya keterlibatan dari negara – negara lain selain dua negara yang terlibat di atas dalam beberapa pertemuan yang membicarakan tentang krisis ini, negara – negara itu adalah Korea Selatan, Cina, Jepang, Rusia. Dalam setiap pembicaraan yang sifatnya multilateral ataupun bilateral negara negara yang cukup memiliki *bargaining power* kuat di Asia ini selalu hadir dan sangat intensif mengikuti perkembangan pembicaraan.

---

<sup>1</sup>*Kompas*, 24 desember 2003,” Membaca dengan Seksama Perkembangan di Semenanjung Korea”,hal 3

Peranan Korea Selatan atas keterlibatannya dalam setiap pembicaraan penyelesaian konflik ini menjadi sebuah fenomena yang cukup menarik untuk dianalisa. Korea selatan hingga saat ini memiliki konfrontasi yang belum ada penyelesaian yang secara nyata sejak perang Korea tahun 1953. Seiring dengan perkembangan jaman keinginan dari rakyat Korea untuk kembali bersatu muncul, dan itu direspon cukup baik hingga terbinalah hubungan dua Korea ini saat Korea Selatan dibawah pemerintahan Kim Dae-Jung dan Korea Utara di bawah Kim Jong-Il (hingga saat ini). Di sisi lain hubungan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat hingga pada waktu itu masih tetap terpelihara dengan baik karena memang ada kepentingan yang saling membutuhkan. Tiga puluh tujuh ribu pasukan Amerika Serikat masih tetap ditempatkan di Korea Selatan membuat Korea Selatan "merasa aman" dari invasi Korea Utara. Jumlah pasukan Amerika Serikat yang sedemikian besar disertai dengan keahlian bertempur dan peralatan perang yang cukup canggih untuk menangkal invasi dari luar, ditambah pula dengan latihan latihan perang terpadu AS – Korea Selatan yang efisien untuk melatih kerjasama dalam menangkal invasi dari luar daerah. Kondisi tersebut merupakan faktor yang membuat Korea Selatan saat ini masih merasa aman dari ancaman agresi dari luar negara, terutama oleh Korea Utara. Demikian juga percepatan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan setiap tahunnya karena sistem perekonomian yang terbuka ditambah lagi dukungan dari "barat" yang cukup membantu untuk membuat Korea Selatan jauh lebih makmur dibandingkan dengan saudaranya Korea Utara.

Sebuah hubungan dilematis yang cukup menarik untuk dianalisa adalah ketika terjadi konflik antara Amerika Serikat dan Korea Utara. Jelas sekali konflik ini terjadi antara dua negara yang sedang membina hubungan dengan Korea Selatan, yang pada nantinya akan terjadi tarik ulur kebijakan dari Korea Selatan terhadap konflik ini yang tentunya cukup menarik untuk dianalisa. Dari fakta dan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk menganalisa sikap Korea Selatan terhadap konflik Korea Utara – Amerika Serikat dalam kasus krisis nuklir 2002 ini.

## **B. POKOK PERMASALAHAN**

Dalam pidato pada tanggal 29 Januari 2002, Presiden Amerika Serikat George W. Bush membuat pernyataan yang provokatif dengan menyebut Korea Utara seperti Irak dan Iran sebagai “*axis of evil*”. Pernyataan ini muncul karena Amerika Serikat menganggap Korea Utara serupa dengan Irak dan Iran dan merupakan negara yang potensial untuk berkembangnya terorisme. Menurut Amerika Serikat terdapat beberapa kesamaan antara Irak dan Korea Utara. Kedua negara ini diduga memiliki senjata pemusnah massal (*Weapons of Mass Destruction – WMD*), mengancam sebagian kawasan, diperintah oleh rezim otoriter, dan menelantarkan rakyat. Menurut Wakil Menteri Pertahanan Paul Wolfowitz, Amerika Serikat memang menghendaki perubahan di banyak negara, termasuk rezim. Namun perubahan itu dilakukan “*by different means in different places*”.<sup>2</sup> Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Amerika Serikat dapat menggunakan instrumen diplomasi maupun perang dalam menghadapi Korea Utara yang dianggap merupakan ancaman bagi kepentingan Amerika Serikat. Sementara itu politik luar negeri di masa pemerintahan George W. Bush salah satunya adalah memerangi terorisme internasional. Pemerintah Amerika Serikat menganggap terorisme internasional merupakan ancaman utama, terlebih setelah terjadinya serangan 11 September 2001. Pemerintah Amerika Serikat telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi berkembangnya terorisme melalui berbagai jalur, termasuk diantaranya upaya diplomatik, militer, finansial, kerjasama dan operasi intelijen, dan *law enforcement*, yang dilaksanakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri

Tujuan dari semua upaya tersebut adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Pengasapan (*smoking out*) teroris agar mereka keluar dari sarangnya sehingga mudah untuk ditangkap, termasuk lubang – lubang yang tak terduga (*sleeping cell*) yang berada di tengah masyarakat.
- b. Mencegah adanya surga perlindungan (*safe heaven*) bagi para teroris.
- c. Mendesak negara – negara yang oleh Departemen Luar Negeri (*Department of State*) dikategorikan sebagai negara pendukung terorisme

---

<sup>2</sup>*Financial Times*, 14/4/2003

<sup>3</sup>Kedutaan Besar R.I, *Laporan Operasional Tahunan*, Washington D.C, 2002, hal 11

(*states sponsoring terrorism*) untuk menghentikan dukungan mereka terhadap terorisme.

- d. Mencegah terjadinya serangan kembali ke Amerika Serikat dengan cara memperkuat keamanan domestik Amerika Serikat.
- e. Meningkatkan kemampuan teman dan aliansi (*friend and allies*) dalam upaya memerangi terorisme.

Guna memerangi teroris, Amerika Serikat akan melakukan serangan terlebih dahulu dan tidak akan menunggu datangnya ancaman (*defensive intervention*). Untuk mencegah terulangnya kembali serangan ke Amerika Serikat, Presiden Bush dalam pidatonya di Akademi West Point tanggal 1 Juni 2002 telah menyatakan akan menerapkan doktrin *pre-emption* sebagai salah satu opsi, khususnya menghadapi negara – negara atau kelompok teroris yang menggunakan senjata pemusnah massal.<sup>4</sup>

Bagi Korea Utara pernyataan presiden Bush tersebut dianggap sebagai sebuah ancaman bagi Korea Utara. Hal itu dapat terlihat dari pandangan dan langkah yang diambil oleh Korea Utara. Dalam pandangan RRDK (Republik Rakyat Demokrasi Korea atau lazim disebut sebagai Korea Utara), kebijakan Amerika Serikat merupakan sebuah pernyataan perang terhadap Korea Utara yang tidak dapat dibiarkannya begitu saja. Pernyataan presiden Bush juga telah menunjukkan secara jelas kebijakan Amerika Serikat yang menghindari dilakukannya dialog dan penyelesaian masalah – masalah bilateral seperti penyelesaian masalah rudal pemusnah massal dan pengembangan nuklir yang telah diletakkan oleh pemerintah sebelumnya. Pada gilirannya, RRDK menyimpulkan bahwa Amerika Serikat juga berkeinginan menghancurkan RRDK, yang untuk itu RRDK menghadapinya dengan politik pertahanan dan keamanan dan kekuatan militer yang kuat.<sup>5</sup>

Pernyataan Bush kemudian melahirkan ketegangan – ketegangan yang membuat kacaunya kesepakatan – kesepakatan yang telah dirumuskan dan disetujui terdahulu baik yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan Korea Utara maupun antara Korea Selatan dengan Korea Utara. Berbagai macam imbas terjadi

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal 12

<sup>5</sup> Kedutaan Besar RI, *Laporan Operasional Tahunan*, Pyongyang, 2002, hal 21

dari ketegangan ini, Korea Utara dengan cepat menarik diri dan menyatakan mundur dari kesepakatan *Nuclear non-proliferation treaty* (NPT), Inspektur nuklir PBB diusir dari Korea Utara, dan kebijakan – kebijakan lain yang membuat krisis semakin besar dan memanas.

Ketegangan semakin terlihat ketika pada Desember 2002, Korea Utara memutuskan untuk mengaktifkan kembali pusat nuklir Yongbyon, membongkar penyekat dan kamera – kamera pemantauan yang dipasang oleh Badan Tenaga Atom Internasional ( IAEA ) yang sebelumnya telah digunakan untuk memverifikasi bahwa reaktor di tempat itu tidak dijalankan sesuai dengan persetujuan yang ditandatangani tahun 1994.<sup>6</sup> Melihat itu Amerika Serikat pun memberikan sanksi kepada Korea Utara dengan menanggukhan pengiriman bahan bakar ke negara tersebut. Bahan bakar ini seharusnya disuplai oleh Amerika Serikat ke Korea Utara sebagai ganti pemenuhan energi di Korea Utara sesuai kesepakatan tahun 1994 (kemudian disebut sebagai *Genewa Framework Agreement*). Dengan adanya *Genewa Framework Agreement* Korea Utara bersedia menghentikan pengoperasian reaktor nuklir Yongbyon dan sebagai gantinya Amerika Serikat akan membentuk konsorsium bersama Jepang dan Korea Selatan untuk membangun dua reaktor air ringan. Selama waktu pembangunan, Amerika Serikat akan mensuplai bahan bakar berupa 500.000 ton bahan bakar minyak berat kepada Korea Utara.<sup>7</sup>

Ketika ketegangan menjadi semakin besar, munculnya negara – negara di sekitar kawasan semenanjung korea seperti Korea Selatan, Jepang, Cina, dan Rusia untuk turut serta menyelesaikan krisis yang tentunya tidak dapat dielakkan. Korea Selatan, sebagai negara yang selama ini memiliki konfrontrasi cukup besar dengan Korea Utara dan sebuah negara yang cukup peduli dengan keamanan kawasannya, merasa harus turut serta dalam penyelesaian konflik ini. Peran Korea Selatan dalam penyelesaian krisis ini semakin kuat dan menjadi logis ketika kepentingan nasional Korea Selatan turut terpengaruh oleh konflik ini. Membina hubungan menuju arah reunifikasi adalah salah satu program Korea Selatan, dan ternyata hubungan kedua Korea benar – benar mengalami kemacetan pasca

---

<sup>6</sup> *Kompas*, 24 desember 2003, Opcit., hal 3

<sup>7</sup> Drs. Dian Wirengjurit, MA, " *Kawasan Damai dan Bebas Senjata Nuklir, Pengertian, Sejarah dan Perkembangannya*," PT. Alumni, Bandung 2002, hal 359

perang pernyataan antara Amerika Serikat dan Korea Utara yang terjadi di Semenanjung Korea itu, padahal sejak awal pemerintahan Kim Dae-Jung usaha reunifikasi Korea sudah dilancarkan secara intensif oleh pemerintahan Korea Selatan. Sudah banyak kesepakatan yang diambil kedua Korea di masa sebelum terjadi konflik nuklir tahun 2002 ini. Usaha yang cukup terlihat nyata adalah terselenggaranya Konferensi Tingkat Tinggi Inter-Korea tahun 2000. Pertemuan ini adalah sebuah pertemuan bersejarah di bulan Juni 2000 dimana untuk pertama kalinya sejak perang Korea (1950 – 1953) pemimpin kedua Korea (Kim Jong-il dan Kim Dae-Jung) dapat bertemu untuk membicarakan perdamaian. Dalam pertemuan antara kedua pemimpin Korea dalam KTT Inter-Korea tanggal 13-15 Juni 2000 telah ditandatangani Deklarasi Bersama Korea Selatan-Korea Utara pada tanggal 15 Juni 2000 yang diharapkan dapat menjadi landasan utama bagi babak baru hubungan antar-Korea dengan melaksanakan kerjasama di berbagai bidang. Adapun isi dari Deklarasi Bersama (*South-North Joint Declaration*) adalah sebagai berikut :

- Reunifikasi independen Korea
- Pengakuan atas kesamaan formula reunifikasi kedua korea
- Pertukaran keluarga – keluarga terpisah dan resolusi atas tahanan Korea Utara
- Meningkatkan keseimbangan pembangunan ekonomi nasional
- Menyelenggarakan dialog tingkat pemerintah dan kunjungan Ketua Kim Jong-il ke Seoul.<sup>8</sup>

Pasca KTT Inter-Korea ini memang dirasakan ketegangan cukup meredah. Kekuatan sebuah kesepakatan setaraf KTT memang cukup berpengaruh dan dapat menunjukkan hasil yang cukup maksimal. Hal ini dapat dilihat dari bentrokan dan insiden laut Korea Utara – Korea Selatan di tahun 1998 dan 1999 yang pada awalnya ditandai dengan intensitasnya cukup tinggi, secara drastis di tahun 2000 dan 2001 bentrokan antara kedua Angkatan Laut Korea ini hampir tidak pernah terjadi. Akan tetapi saat memasuki tahun 2002 insiden kembali muncul mengiringi semakin memburuknya hubungan Korea Utara – Amerika Serikat yang mengawali krisis nuklir, pada tanggal 29 Juni 2002 terjadi lagi pertempuran

---

<sup>8</sup> Kedutaan Besar RI, *Laporan Operasional Tahunan*, Seoul tahun 2000 hal 25 - 26

antara Angkatan Laut Korea Utara dan Angkatan Laut Korea Selatan di Laut Kuning. Bentrokan ini menyebabkan sekitar empat orang pelaut Korea Utara tewas dan 19 lainnya luka luka, bentrokan ini berbuntut pada penghentian bantuan pangan yang diberikan presiden Kim bagi Pyongyang.<sup>9</sup>

Pasca ketegangan yang terjadi di semenanjung Korea di tahun 2002 tersebut, Korea Selatan tetap berusaha untuk menjaga hubungan yang telah dirintis sejak masa pemerintahan Kim Dae-Jung. Pada tanggal 7 Januari 2003, juru bicara Komite Transisi Kepresidenan, Joung Soon-Kyun mengumumkan 10 program lima tahunan presiden baru terpilih Korea Selatan, dan upaya membangun mekanisme perdamaian di Semenanjung Korea adalah salah satu program yang menjadi prioritas utama. Upaya untuk menuju penyelesaian secara damai atas krisis yang terjadi ini juga ditempuh Roh dengan diplomasi marathon yang dilakukan ke sejumlah negara berpengaruh di kawasan semenanjung Korea, seperti Jepang dan Cina. Pada KTT Tokyo tanggal 7 Juni 2003, Roh mengusulkan kepada mitranya Perdana Menteri Jepang Koizumi agar Jepang dan Korea Selatan bisa menekan Pyongyang melalui dialog dan tekanan politik dalam hal pengembangan senjata nuklir Korea Utara. Lebih lanjut Roh memberikan pernyataan bahwa untuk mengatasi ketegangan akibat isu nuklir Korea Utara, memerlukan dialog dan tekanan, akan tetapi Roh lebih menekankan pada upaya dialog.<sup>10</sup> Upaya membangun hubungan juga dilakukan langsung dengan Korea Utara, itikad baik untuk membina hubungan dibuktikan dengan kesiapan Korea Selatan menyumbangkan 200.000 ribu ton pupuk yang diminta Korea Utara sewaktu menawarkan kesediaan negara komunis yang dilanda kelaparan ini untuk memulai dialog antar – Korea.<sup>11</sup>

Sementara itu di lain pihak hubungan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat saat konflik nuklir dimulai juga mengalami peningkatan, dalam arti hubungan yang selama ini terpelihara menjadi semakin kuat ketika muncul

---

<sup>9</sup> *Republika*, 12 juli 2002, "Kim Dae-Jung Rombak Kabinet", hal 7 *Suara Pembaruan*, 26 Februari 2003, "Dambaan Presiden Korea Selatan, Perdamaian dan Pusat Ekonomi", hal

10

<sup>10</sup> *Suara Pembaruan*, 30 Juli 2003, "Diplomasi Roh dan Stabilisasi Semenanjung Korea", hal 10

<sup>11</sup> *Kompas*, 22 April 2003, "Korea Selatan Menerima Tawaran Korea Utara", hal 4

konflik ini. Aktivitas yang sifatnya koordinasi dan kompromi antara dua negara ini seringkali diadakan dan sangat intensif. Pemikiran logis dari Korea Selatan muncul ketika krisis ini bukan sekedar konflik antara dua negara yang bertikai, akan tetapi juga sudah menjadi ancaman bagi negara – negara di sekitar daerah konflik. Peningkatan pengamanan di sekitar perbatasan dan latihan perang gabungan Amerika Serikat – Korea Selatan tetap diadakan walaupun mendapat tentangan dari rakyat Korea Selatan sendiri. Bagi pemerintah Korea Selatan, latihan perang yang diselenggarakan tiap tahun sejak tahun 1976 hanya sebuah upaya untuk mempertahankan diri. Hal ini dapat dilihat pada sebuah pernyataan Kim Dae-Jung saat akan dimulainya latihan perang gabungan AS – Korea Selatan tahun 2001 yang menyatakan, ” latihan perang selama 12 hari ini adalah untuk mempertahankan perdamaian, kami harus memelihara kondisi keamanan secara pasti, jika perang terjadi tidak ada perbedaan apakah anda di depan atau di belakang, jadi kita harus siap menjaga perang yang berulang”.<sup>12</sup> Di tahun 2002 latihan perang yang diagendakan tiap tahun ini digelar kembali, Komando pasukan Terpadu (CFC) Amerika Serikat dan Korea Selatan menamakan latihan itu RSOI / FE 02 *Reception, Staging, Onward Movement and Integration* karena melibatkan permainan perang komputer dan latihan lapangan tahunan *Foal Eagle*, dan pihak militer Amerika Serikat mengatakan latihan itu semata untuk membela diri.<sup>13</sup> Jadi bagi Korea Selatan, latihan perang yang dilakukan bukanlah upaya persiapan untuk melakukan invasi terhadap Korea Utara akan tetapi hanyalah sebuah langkah antisipasi apabila yang terjadi nanti adalah hal yang terburuk yang akan dialami. Bahkan Seoul berupaya untuk menghindari publikasi tentang latihan perang gabungan yang dilakukan di tahun 2001 guna mencegah ambruknya proses rekonsiliasi dengan Korea Utara. Oleh sebab itu Korea Selatan menolak mengungkapkan pada pers jumlah tentara Korea Selatan yang dikerahkan untuk latihan tersebut.<sup>14</sup>

Demikian juga intensitas pertemuan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan yang khusus membahas masalah krisis makin kerap dilakukan, baik

---

<sup>12</sup>*Suara pembaruan*, 21 Agustus 2001, ” Latihan Perang AS – Korea Selatan”, hal 11

<sup>13</sup>*Kompas*, 22 Maret 2002, ”Korea Selatan dan AS Gelar Latihan Gabungan Terbesar”, hal 3

<sup>14</sup>*Kompas*, 21 Agustus 2001, ”AS dan Korea Selatan Lakukan Latihan Perang”, hal 3



pertemuan bilateral maupun multilateral yang juga melibatkan negara-negara kawasan seperti Jepang, Cina, Rusia. Imbas yang dirasakan sebenarnya begitu besar ketika kesepakatan yang telah dicetuskan bersama dengan mudah tak lagi diabaikan karena kepentingan sebuah negara pada akhirnya terancam dan tidak lagi ada jaminan keamanan secara global.

### **C. PERUMUSAN MASALAH**

Dengan melihat latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan pokok permasalahan, yaitu bagaimana Kebijakan Korea Selatan dibawah Pemerintahan Kim Dae-Jung menghadapi konflik antara Amerika Serikat – Korea Utara.

### **D. KERANGKA TEORI**

Kerangka dasar pemikiran diperlukan untuk membantu dalam menetapkan tujuan dan arah penelitiannya serta memiliki konsep yang tepat untuk pembentukan hipotesanya.<sup>15</sup> Teori bukan merupakan pengetahuan yang sudah pasti, tapi merupakan petunjuk hipotesis. Untuk menjelaskan respon Korea Selatan terhadap konflik Amerika Serikat dan Korea Utara ini maka penulis menggunakan konsep politik luar negeri.

#### **1. Konsep Politik Luar Negeri**

Dalam menjalin hubungan dengan negara lain, suatu negara mempunyai politik luar negeri, yang meliputi semua kebijakan yang diambil oleh suatu negara dengan negara lain.<sup>16</sup> Output kebijakan luar negeri biasanya merupakan tindakan yang diambil atau gagasan yang dirancang oleh pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah atau mempromosikan suatu tindakan dalam lingkungan, yaitu dalam kebijakan, sikap atau tindakan negara.

Sedangkan menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, politik luar negeri merupakan :

---

<sup>15</sup>Koenjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia, Jakarta, hal 31

<sup>16</sup>TB Millar, "On Writing About Foreign Policy". dalam James N Rosenau (Ed), *International Politics and Foreign Policy*, The Free Press, New York, 1969, hal.57.

*Strategi atau tindakan terencana yang dikembangkan oleh para pembuat keputusan, yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan tujuan nasional, dan politik luar negeri meliputi proses yang dinamis dalam menetapkan interpretasi yang relatif mantap terhadap kepentingan - kepentingan nasionalnya dalam menghadapi faktor situasional yang sering berubah di lingkungan internasional. Proses ini untuk mengembangkan tindakan-tindakan yang diikuti oleh usaha – usaha untuk mencapai pelaksanaan garis – garis kebijakan luar negeri secara diplomatis.*<sup>17</sup>

Dari definisi yang dikemukakan Plano dan Olton tersebut, terlihat ada empat unsur utama dalam politik luar negeri. Keempat unsur tersebut adalah strategi, aktor aktor pembuat keputusan, lingkungan eksternal dan tujuan atau kepentingan nasional suatu negara.

Jadi politik luar negeri bertujuan untuk mewujudkan tujuan, cita – cita nasional serta memenuhi kebutuhan utama suatu negara. Dengan kata lain, politik luar negeri merupakan langkah nyata guna mencapai, mempertahankan, dan melindungi kepentingan nasional negara tersebut.

Sedangkan konsep kepentingan nasional itu sendiri menurut Hans J. Morgenthau adalah kelangsungan hidup negara. Kemampuan minimum negara adalah melindungi identitas fisik, politik, dan budayanya dari gangguan negara lain. Dalam pengertian yang lebih spesifik, negara harus mempertahankan integritas teritorialnya (yaitu identitas fisiknya); mempertahankan rezim ekonomi dan politiknya (yaitu identitas politiknya); yang mungkin saja demokratis, otoriter, sosialis, atau komunis; serta memelihara norma – norma etnis, religius, linguistik, dan sejarah (yaitu identitas budayanya).<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Jack C. Plano dan Roy Olton, *The International Dictionary*, ABC-CLIA, California, 1982, Hal.127

<sup>18</sup>Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990, hal 141

Menurut K J Holsti, politik luar negeri memiliki dua tujuan yaitu tujuan jangka menengah dan jangka panjang, yaitu :<sup>19</sup>

1. Tujuan jangka menengah terbagi dalam tiga tipe. Tipe pertama, mencakup usaha pemerintah untuk memenuhi tuntutan dan perbaikan ekonomi melalui tindakan internasional. Kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi tidak dapat dicapai dengan kekuatan sendiri. Karena kebanyakan negara hanya mempunyai sumber daya, jasa administrasi, dan kemampuan teknis yang terbatas, negara harus berinteraksi dengan negara lain. Tipe kedua adalah meningkatkan prestise negara dalam sistem itu. Di masa lalu, tujuan ini terutama dilakukan melalui jalur diplomatik dan pameran kekuatan militer, tetapi di jaman sekarang prestise diukur dengan tingkat perkembangan industri dan serta teknologi. Bagi para elit politik di negara berkembang yang sangat peka terhadap kemiskinan materi menganggap dengan melaksanakan program pembangunan yang besar dapat meningkatkan prestise internasionalnya. Sedangkan bagi negara industri dan negara besar, melalui sejumlah tindakan dan kebijakan maka prestise internasionalnya akan meningkat. Tindakan dan kebijakan itu termasuk juga ekspansi kemampuan militer, pembagian bantuan luar negeri, jalur diplomatik – termasuk kunjungan balasan oleh kepala negara dan pameran industri dan ilmu dan khususnya lewat pengembangan senjata nuklir serta kemampuan menjelajahi angkasa luar. Tipe ketiga mencakup banyak bentuk perluasan diri atau imperialisme. Beberapa negara mengklaim wilayah tetangga sekalipun wilayah itu tidak memenuhi persyaratan militer atau kesatuan etnis yang penting. Perluasan wilayah menjadi tujuan dalam dirinya sendiri terlepas dari apakah ia memenuhi atau tidak memenuhi kebutuhan strategis, ekonomi atau sosial. Negara lain tidak menduduki wilayah asing, tetapi mencari keuntungan, termasuk akses pada bahan mentah, pasar dan rute perdagangan yang tidak dapat mereka peroleh melalui

---

<sup>19</sup>K.J Holsti dan M.Tahir Azhary, *Politik Internasional, Kerangka untuk Analisis, Edisi keempat jilid II*, Erlangga, Jakarta, 1988, Hal 145 dan 147

perdagangan biasa atau diplomasi. Pengendalian dan akses eksklusif mungkin diperoleh melalui protektorat ,”satelit” atau ”lingkup pengaruh”. Perluasan diri secara ideologis juga lazim dalam banyak bentuk, dimana wakil pemerintah berusaha mempromosikan nilai politik, ekonomi dan sosialnya sendiri di luar negerinya atau ”mentobatkan” rakyat negara lain ke dalam agama, budaya atau keyakinan politik tertentu.

2. Tujuan jangka panjang adalah rencana, impian, dan pandangan mengenai organisasi politik atau ideologi terakhir sistem internasional, aturan yang mengatur hubungan dalam sistem itu dan peran negara tertentu didalamnya. Perbedaan antara tujuan jangka menengah dan jangka panjang tidak hanya berhubungan dengan unsur waktu yang berlainan yang inheren di dalamnya; juga ada perbedaan penting dalam lingkup. Dalam rangka mencapai tujuan jangka menengah, negara melakukan tekanan tertentu pada negara tertentu untuk mencapai tujuan jangka panjang, negara biasanya melancarkan tuntutan universal karena tujuannya tidak kurang dari membangun kembali satu sistem internasional menyeluruh menurut rencana atau pandangan yang secara internasional dapat diterapkan.

## **2. Politik luar negeri Korea Selatan**

Politik luar negeri Korea Selatan yang terkandung dalam kebijakan – kebijakan luar negeri mencerminkan tujuan negara ini dalam keputusan politik luar negerinya. Dalam tujuan jangka menengah, usaha pemerintah Korea Selatan untuk memenuhi tuntutan perbaikan ekonomi dan kesejahteraan sosial dilakukan dengan melalui tindakan internasional, salah satunya yang cukup berpengaruh besar adalah membangun aliansi dengan negara – negara Barat terutama dengan Amerika Serikat. Dengan membangun hubungan yang erat dengan Amerika Serikat, diharapkan jaminan keamanan akan terwujud di Korea Selatan dan hal itu juga berpengaruh kepada jaminan perkembangan perekonomiannya di pasar

internasional yang akan mendapat dukungan dari Amerika Serikat. Jika hubungan ini terus terwujud dan terpelihara maka tuntutan perbaikan ekonomi dan kesejahteraan sosial oleh masyarakat dengan mudah akan terpenuhi. Akan tetapi, hal diatas sebenarnya bukanlah tujuan jangka menengah dari Korea Selatan. Ada dua tujuan menengah yang utama dari Korea Selatan, yang pertama adalah melepaskan diri dari intervensi Amerika Serikat, sedangkan yang kedua adalah menyatukan kembali Korea Utara dan Korea Selatan yang telah lima puluh tahun lebih berpisah akibat perang korea 1950 – 1953. Dari dua tujuan tersebut, keduanya memiliki bobot yang sama yang harus dilaksanakan semua.

Oleh karena itu, secara garis besar politik luar negeri Korea Selatan tentang kawasan semenanjung Korea ini adalah sebuah upaya menuju kearah rekonsiliasi Korea, hal ini terbukti dalam garis garis besar politik luar negeri Korea Selatan yang salah satunya berbunyi :

*Pemerintah Korea Selatan akan tetap mendorong kebijakan sebagai usaha untuk mengurangi ketegangan Selatan – Utara dan meningkatkan pertukaran hubungan bilateral, sebagai tanda abad perdamaian dan kesejahteraan di semenanjung korea. Dengan memperkuat konsensus nasional dan kerjasama supra – partisan, pemerintah akan menjamin bahwa hubungan Selatan – Utara akan mendapat dukungan masyarakat. Sementara itu postur keamanan nasional tetap dipertahankan sampai perdamaian benar – benar terbentuk di Semenanjung Korea.*<sup>20</sup>

Demikian juga dengan tujuan jangka panjang yang dimiliki oleh Korea Selatan, sama dengan negara lainnya Korea Selatan juga memiliki rencana, impian, dan pandangan mengenai organisasi politik dan ideologi terakhir sistem internasional. Upaya Rekonsiliasi Korea dan melepaskan diri dari ketergantungan terhadap Amerika Serikat bukanlah tujuan akhir dari Korea Selatan karena Korea Selatan masih mempunyai impian, dan

---

<sup>20</sup>Laporan Kedutaan Besar RI di Seoul tahun 2000, *Op.cit*,hal 25

pandangan mengenai organisasi politik dan ideologi terakhir sistem internasional. Ketika rekonsiliasi Korea terwujud dan diikuti dengan lepasnya intervensi militer Amerika Serikat, maka hal tersebut sangat berpengaruh juga terhadap upaya Korea Selatan yang berusaha untuk melepaskan diri dari ketergantungannya pada jaminan perekonomian Amerika Serikat. Dan yang paling utama adalah Korea Selatan akan memiliki posisi yang sejajar dan sederajat dengan semua negara termasuk juga dengan Amerika Serikat, seperti pernyataan presiden Korea Selatan Roh Moo-hyun yang berbunyi demikian :

*Setidaknya Amerika Serikat jangan berharap sesuatu yang luar biasa dari Seoul, di masa masa kritis sekarang setelah pernyataan bermusuhan yang dilontarkan oleh Korea Utara. Hubungan di masa depan Korea Selatan dengan Amerika Serikat harus setara dan saling menghormati. Dan hubungan tersebut harus harmonis, sehingga Washington tidak menganggap bahwa Korea Selatan adalah semacam "bawahan atau budak" Amerika Serikat di Asia Pasifik.<sup>21</sup>*

Dalam hal ini Korea Selatan juga merasa sangat perlu terlibat dalam penyelesaian konflik nuklir tersebut karena krisis ini bukan sekedar krisis hubungan antara Korea Utara dan Amerika Serikat saja, tetapi sudah menjadi ancaman bagi negara-negara di kawasan semenanjung Korea, terutama Korea Selatan. Dalam faktanya, selama krisis nuklir telah beberapa kali pasukan Korea Selatan dan Korea Utara terlibat dalam konfrontasi dan baku tembak di daerah perbatasan, sebagai contoh pada 17 Juli 2003 Pasukan Korea Utara dan Korea Selatan baku tembak di daerah perbatasan, Kolonel Lee Hong-Gi – Kepala Staf Gabungan Selatan (JCS) - mengatakan, baku tembak antara pos penjagaan Korea Utara dan Korea Selatan di zona demiliterisasi itu berlangsung hampir selama satu menit. Berondongan senapan Korea Utara mengenai tembok pos penjagaan Korea Selatan. Menurut Lee, pasukan Korea Utara mulai menembak pukul 06.10, Kamis pagi dan dibalas oleh tentara Korea Selatan. Tidak dilaporkan adanya

korban di pihak Korea Selatan, tetapi belum bisa diketahui apakah juga ada korban di kalangan Korea Utara.

---

<sup>21</sup>*Suara Pembaruan*, 3 januari 2003, "Roh Moo-hyun Mainkan Dua Kartu Utama", hal 11

kan berondongan tembakan. Tiga berondongan tembakan mengenai pos jaga Korea Selatan, sekitar 1.100 meter dari pos Korea Utara di bagian tengah daerah zona demiliterisasi (DMZ) seluas empat kilometer yang membelah semenanjung itu dari laut ke laut sepanjang 240 kilometer.<sup>22</sup>

Melihat intensitas konfrontasi yang mengalami peningkatan semasa krisis nuklir, Korea Selatan merasa kepentingan nasionalnya pun sudah terganggu, integritas teritorial, rezim ekonomi dan politik, norma – norma etis, religius, linguistik, dan sejarah perlu untuk dilindungi oleh negara. Turut aktif dalam setiap perundingan yang membahas tentang penyelesaian krisis adalah upaya juga dari Korea Selatan untuk menciptakan keamanan kawasan yang secara otomatis juga akan menciptakan keamanan bagi seluruh wilayah teritorialnya. Dan tentunya disamping itu, jalinan kerjasama yang selama ini dibina dengan Amerika Serikat juga turut memberikan kontribusi yang besar bagi terciptanya keamanan bagi wilayah Korea Selatan.

## **E. HIPOTESIS**

Dari uraian diatas penulis dapat menarik hipotesa bahwa :

1. Korea Selatan tetap memberikan sikap yang positif terhadap Amerika Serikat. Korea Selatan tetap akan menjalin hubungan dengan Amerika Serikat terutama di bidang pertahanan keamanan, ekonomi dan juga politik. Kerjasama tersebut dianggap masih cukup strategis untuk menjamin dan melindungi kepentingan nasional Korea Selatan.
2. Korea Selatan kembali akan membina kembali hubungan dengan Korea Utara yang hampir hancur karena krisis nuklir di Semenanjung Korea.

Dengan konsep Sunshine Policy yang diperbaharui oleh pemerintahan Roh Moo-hyun Korea Selatan akan membangun lagi hubungan yang akan membawa Korea ke arah Reunifikasi.

3. Dengan adanya kepentingan ekonomi, politik dan pertahanan keamanan maka Korea Selatan terdorong untuk bersikap netral dan proaktif dalam krisis Semenanjung Korea. Di satu pihak Korea Selatan tetap menjalin hubungan dengan Amerika Serikat, dan di lain pihak juga tetap mempertahankan hubungan dengan Korea Utara.

#### **F. METODE PENELITIAN**

Teknik pengumpulan data dalam tulisan menggunakan Teknik *Library Research*. Sumber data diambil dari beberapa buku, dokumen-dokumen resmi dan jurnal – jurnal, serta dilengkapi informasi yang didapat dari internet, majalah dan surat kabar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menjelaskan dengan menggambarkan berdasarkan data – data yang ada secara obyektif, apa adanya tanpa ada pengaruh subyektifitas penulis, dan menjelaskan variabel – variabel yang dibangun dari data – data yang ada sehingga diperoleh hubungan satu sama lainnya untuk sampai pada suatu kesimpulan. Hasil studi deskriptif analitis adalah tersedianya gambaran yang lengkap tentang subyek yang diteliti sekaligus aktifitas sosial yang terdapat di dalamnya.<sup>23</sup>

#### **G. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sikap dan kebijakan Korea Selatan di bawah pemerintahan Kim Dae-Jung terhadap konflik Korea Utara dan Amerika Serikat, menyangkut krisis nuklir di Semenanjung Korea

#### **H. JANGKAUAN PENELITIAN**

Penulis merasa perlu untuk membatasi waktu pembahasan, hal ini dimaksudkan agar dapat lebih mempertajam penganalisaan, ruang lingkup waktu yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sejak pecahnya krisis nuklir antara Korea Utara dan Amerika Serikat di tahun 2002.



Namun demikian tidak menutup kemungkinan penggunaan data – data  
<sup>23</sup>W.Lawrence Neuman, *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approachman*, Allys&Bacon. A Person Education Company,2000, hal.21-22

Sebagai bahan pertimbangan bahwa krisis nuklir di Semenanjung Korea yang terjadi ini, hingga saat ini masih terus berlanjut, walaupun dari sejak awal krisis sudah banyak upaya pemecahan yang dilakukan.

## **I. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan tesis ini disusun dengan pembabakan sebagai berikut:

BAB I           Pendahuluan dalam bab ini dipaparkan latar belakang masalah, pokok permasalahan, perumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian, tujuan penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II           Perkembangan Politik Luar Negeri Korea Selatan Terhadap Korea Utara dan Amerika Serikat, Sebelum dan pada masa Krisis Nuklir 2002 di dalamnya dipaparkan Dinamika Politik Luar Negeri Korea Selatan, Perkembangan Krisis Nuklir 2002, di Semenanjung Korea, Respon Korea Selatan dalam Penyelesaian Konflik.

BAB III          Kebijakan Politik Korea Selatan dalam Penyelesaian Krisis Nuklir Semenanjung Korea 2002, di dalamnya dibahas Sejarah Politik Kontemporer Republik Korea, Nilai Politik Strategis Hubungan dengan Kedua Negara Yang Berkonflik ( Korea Utara – Amerika Serikat).

Bab IV Kebijakan Ekonomi Korea Selatan dalam Penyelesaian Krisis Nuklir Semenanjung Korea 2002, di dalamnya dibahas Pertumbuhan Ekonomi Korea Selatan, Arti Penting Amerika Serikat dalam Perekonomian Korea Selatan, Arti Penting Korea Utara terhadap Perekonomian Korea Selatan.

BAB V Kebijakan Pertahanan Keamanan Korea Selatan dalam Penyelesaian Krisis Nuklir di Semenanjung Korea 2002, di dalamnya dipaparkan Perkembangan Kondisi Pertahanan Keamanan di Semenanjung Korea, Kepentingan Korea Selatan terhadap Aliansi Pertahanan Keamanan dengan Amerika Serikat, Kepentingan Korea Selatan dalam melakukan *Engagement Policy* terhadap Korea Utara.

Bab VI Penutup yang berisikan kesimpulan dari bab – bab sebelumnya. Penulis akan menyimpulkan paparan yang telah diteliti dengan menggunakan kerangka teori dan menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan dalam tesis ini.

